

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Setiap kawasan memiliki karakteristik masing-masing, tapi bagi Asia, ekonomi adalah raja. Hubungan antar negara di kawasan ini yang diwarnai dengan ketegangan dan perselisihan, serta dibayangi sejarah pertarungan berdarah. Dalam teori ekonomi sendiri kita mengenal istilah *The Asian Miracle* yang menandakan progres pertumbuhan ekonomi Asia yang begitu cepat. Sebelumnya, di pertengahan abad 20, negara-negara di Asia menghadapi situasi yang benar-benar kacau dimana peperangan, kemiskinan, kelaparan melanda negara-negara di kawasan tersebut. Tiongkok adalah salah satu negara yang tidak beruntung pada waktu itu karena mengalami peperangan, revolusi, dan kelaparan sekaligus. Meskipun demikian, Tiongkok sekarang ini telah berhasil bangkit dari masa kelamnya, terbukti dengan kekuatan ekonomi yang dimilikinya. Yang mana sekarang Tiongkok menjadi negara yang disegani di kawasan Asia maupun dunia.

Hal yang mendasari Tiongkok sekarang dipandang sebagai negara super power baru yang disegani karena Tiongkok adalah salah satu negara eksporter terbesar di dunia. Sejak reformasi pasar pada akhir tahun 70-an, ekonomi Tiongkok telah meningkat empat kali lipat dan diperkirakan akan berlipat ganda pada dekade berikutnya (Ikenberry, 2008). Pertumbuhan Tiongkok tersebut merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. Pada tahun 2009, runtuhnya pasar ekspor internasional yang

disertai krisis finansial global telah berdampak pada Tiongkok, tetapi ekonomi negara ini dengan segera tumbuh kembali (TEMPO, 2016).

Pada Agustus 2010, Tiongkok diberitakan berhasil melampaui Jepang sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia, dan dengan demikian terbesar di Asia Timur. Pemimpin ekonomi dunia menjadi begitu penting dalam hubungan internasional karena ekonomi (bersama dengan militer) adalah fundamental power dalam politik dunia. Berbeda dengan abad 18 hingga 19 dimana perluasan wilayah dan persaingan militer adalah hal krusial untuk menjadi negara yang *powerful*. Di abad 20 dan 21, perdagangan telah menjadi alat dalam politik dunia, baik sebagai instrument untuk memperkuat aliansi, sekaligus juga untuk memberikan sinyal kepada rival, atau menahan semakin meluasnya pengaruh potential *emerging power* (Froman, 2014).

Mempunyai prestasi yang sangat mengagumkan dalam hal perekonomian tidak membuat Tiongkok puas atas perolehannya tersebut. Yang mana sekarang ini Tiongkok kembali membuat isu hangat perihal pengembangan kekuatan militernya. Pengembangan kekuatan militer Tiongkok inilah yang belakangan ini kembali menjadi isu hangat internasional, khususnya di kawasan Asia Timur. Terutama setelah Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau Pentagon dalam laporan tahunannya yang juga dimuat dalam media massa internasional juga menyinggung perihal pengembangan kekuatan militer Tiongkok yang disebut berpotensi mengubah perimbangan kekuatan militer di Asia dan dapat mengancam negara-negara di kawasan. Tak heran jika Tiongkok dipersepsikan oleh banyak negara akan menjadi *super power* baru di masa depan. Tidak hanya karena pertumbuhan ekonomi yang

sangat kuat hingga mencapai rata-rata 9-10% per tahun (terutama pada dekade 1990-an), tetapi juga karena kekuatan militernya (Muhamad, 2009).

Kekuatan ekonomi yang diiringi dengan pembangunan kekuatan militer ini kemudian meningkatkan kepercayaan diri dan keinginan Tiongkok untuk berperan lebih dominan dalam hubungan internasional. Tiongkok memperluas pengaruh tidak hanya di kawasan Asia, tetapi juga Afrika, Timur Tengah, Eropa, dan Amerika Selatan. Hal ini dilakukan untuk menghindari Tiongkok bergantung hanya pada satu kawasan sumber penyuplai energi. Sehingga, jika salah satu kawasan mengalami instabilitas, pergerakan roda ekonomi Tiongkok tetap aman.

Dalam kebijakan reformasi 2005, Tiongkok mengincar untuk menjadikan Renminbi masuk dalam mata uang cadangan *International Monetary Fund* (IMF). Namun, kendali atas Renminbi menjadi penghalang mata uang itu masuk dalam kelompok yang sekarang ‘dihuni’ oleh Dolar AS, Euro, Poundsterling dan Yen. Langkah Bank Sentral untuk memperbanyak informasi ketika menetapkan nilai harian bisa dianggap sebagai pelanggaran kendali mereka, sehingga bisa lebih memenuhi syarat IMF. (Kompas, Mata Uang IMF dan Internasionalisasi Yuan, 2015).

Lalu beranjak dari kebangkitan kekuatan Tiongkok, pada tahun 2015 Tiongkok kembali menggemparkan dunia internasional. Seperti yang kita ketahui, tingginya kurs valuta asing sangat merugikan banyak negara. Hal ini dapat kita lihat pada mata uang Tiongkok yang semakin menjadi perhatian dunia. Bukan bagi para ekonom saja tetapi juga pemimpin-pemimpin negara adidaya. Selama ini, pemerintah

Tiongkok dianggap tidak *fair* dalam menetapkan kebijakan mata uangnya. Kebijakan mata uang Tiongkok memang ibarat senjata andalan Tiongkok dalam menghadapi peperangan modern saat ini. Pemerintah Tiongkok telah mendevaluasi mata uangnya sebesar hampir 2% terhadap dolar AS untuk mendongkrak ekspor dan menjadikan Renminbi sebagai salah satu mata uang cadangan global yang resmi. Ekspor Tiongkok mengalami penurunan besar-besaran. Hal ini merupakan titik nadir yang menyebabkan otoritas setempat mendapatkan tekanan internal.

Hal ini difokuskan ke mata uang yang dilihat dari dolar yang makin melejit sepanjang tahun lalu karena ekspektasi bahwa Amerika Serikat akan meningkatkan suku bunga patokan yang pertama kali sejak krisis finansial terakhir. Karena pergerakan Renminbi terhadap Dolar AS relatif longgar, nilainya ikut terseret naik, dan tingkat diferensialnya relatif sama dengan dolar. Akan tetapi, hal tersebut ternyata membuat harga barang-barang negara itu lebih mahal dibandingkan para pesaing regional khususnya Korea Selatan dan Jepang. Hal itu menjadi ‘pukulan keras’ buat ekspor Tiongkok. Sekarang ini, bank sentral AS atau *US Federal Reserve* makin dekat untuk meningkatkan suku bunganya yang pertama kali dalam tujuh tahun, sehingga berpotensi membuat Dolar semakin naik, yang dari sudut pandang Tiongkok akan membuat situasi lebih buruk (Berita Satu, Memahami Devaluasi Yuan Oleh Tiongkok, 2015).

Akibat devaluasi yang dilakukan Tiongkok, *International Monetary Fund* (IMF) telah memutuskan RENMIBI (RMB), mata uang Tiongkok, untuk ikut bergabung dalam *Special Drawing Rights* (SDR). Sehingga, pada 1 Oktober 2015,

RMB resmi menjadi mata uang internasional (Indonesiamedia, 2015). Ada kriteria utama yang menjadikan IMF bisa meloloskan mata uang Tiongkok menjadi mata uang internasional, yaitu Tiongkok harus dijadikan negara utama perdagangan dunia. Oleh karena itu, mata uang Tiongkok harus dijadikan mata uang yang bisa digunakan secara bebas di pasar internasional. Syarat tersebut bisa dipenuhi Tiongkok. Pastinya, Renminbi ditetapkan sebagai mata uang internasional kelima melengkapi 4 mata uang internasional yang sudah diakui sebelumnya.

Sebelum ditetapkannya renminbi sebagai mata uang internasional, beberapa ahli ekonomi memprediksikan bahwa jika hal tersebut terjadi bisa juga berdampak pada negatif bagi Tiongkok, seperti yang diungkapkan oleh Ekonom dari Universitas Gajah Mada (UGM), Tony Prasetyantono bahwa penggunaan Renminbi sebagai mata uang internasional tidak selalu menguntungkan Tiongkok bahkan apabila Renminbi di internasionalisasikan, yang mendapatkan kerugian yaitu Tiongkok itu sendiri. Ekonom asal Universitas Gajah Mada tersebut juga mengungkapkan bahwa masuknya Renminbi dalam jejeran mata uang dunia, selain Dolar Amerika Serikat, Yen, Euro dan Poundsterling, dapat memicu peningkatan permintaan terhadap Renminbi ke depan. Hal ini tentu saja akan beresiko, pasalnya nilai mata uang Renminbi akan menguat karena banyak yang membutuhkan, baik untuk transaksi, cadangan devisa (cadev) maupun perorangan. Yang mana itu merupakan salah satu contoh dampak negatif bagi Tiongkok (Ariyanti, 2015).

Meskipun beberapa ekonom beranggapan bahwa tindakan Tiongkok dalam menginternasionalisasikan Renminbi dapat berdampak pada Tiongkok itu sendiri

namun hal tersebut tidak mempengaruhi keputusan Tiongkok untuk menjadikan Renminbi sebagai salah satu alat tukar resmi perdagangan internasional. Terbukti pada 1 Oktober 2015 Renminbi telah resmi bersanding dengan mata uang internasional lainnya.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas adalah **“Mengapa Tiongkok menjadikan Renminbi sebagai Mata Uang Internasional?”**

Kerangka Berpikir

Untuk menganalisa mengapa Tiongkok menjadikan Renminbi sebagai mata uang internasional diperlukan teori guna mengkajinya. Dalam hal ini penulis akan menggunakan teori sebagai alat untuk memahami fenomena yang sedang menjadi objek penelitian yaitu konsep hegemoni menurut Antonio Gramsci.

1. Konsep Hegemoni

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Hegemoni adalah pengaruh kepemimpinan, dominasi, kekuasaan, dsb suatu negara atas negara lain (atau negara bagian) (KBBI, n.d.). Dalam *Oxford Advance Learner's Dictionary of English*, Hegemoni diartikan sebagai kontrol dan kepemimpinan, khususnya oleh suatu negara terhadap suatu kelompok masyarakat dalam hal kebudayaan, politik, militer dan ekonomi. Berbeda dari dominasi yang berarti penguasaan oleh pihak yang lebih kuat terhadap yang lebih lemah (dalam bidang politik, militer, ekonomi, perdagangan, olahraga, dan sebagainya) (Oxford Learner's Dictionary, n.d.).

Dalam Bahasa Yunani kuno hegemoni disebut 'eugemonia', sebagaimana dikemukakan Encyclopedia Britanica dalam prakteknya di Yunani, diterapkan untuk menunjukkan dominasi posisi yang diklaim oleh negara-negara kota (*polis* atau *citystates*) secara individual, misalnya yang dilakukan oleh negara kota Athena dan Sparta, terhadap negara-negara lainnya yang sejajar (Hendarto, 1993).

Kepustakaan marxis menunjukkan, bahwa konsep hegemoni secara historis pertama kali diproduksi di Rusia pada tahun 1880 oleh seorang marxis Rusia, Plekanov (Bocock, 1986). Konsep ini di bangunnya sebagai bagian dari strategi guna menjatuhkan pemerintahan Tsar. Hegemoni dalam definisi ini mengacu kepada pengertian kepemimpinan *hegemonic proletariat* dari perwakilan-perwakilan politik mereka serta aliansi-aliansi dengan kelompok lain seperti: kaum borjuis kritis, petani dan intelektual, yang berkeinginan sama untuk menjatuhkan pemerintahan Tsar (Patria & Arief, 1999).

Antonio Gramsci mengatakan bahwa hegemoni menunjukkan sebuah kepemimpinan dari suatu negara tertentu yang bukan hanya sebuah negara kota terhadap negara-negara lain yang berhubungan secara longgar maupun secara ketat terintegrasi dalam negara "pemimpin". Dalam konteks politik internasional, misalnya, pada periode perang dingin, pertarungan pengaruh antara negara adikuasa seperti Amerika Serikat dan mantan Uni Sovyet, pada masa perang dingin, biasanya disebut sebagai perang untuk menjadi hegemonik di dunia (Patria & Arief, 1999).

Pada era saat ini hegemoni dapat digunakan pada suatu negara secara lebih luas dalam politik internasional guna mencapai suatu kepentingan negara tersebut.

Hegemoni yang digunakan dalam politik internasional bisa melalui bidang-bidang seperti politik dan ekonomi. Dalam buku Hudiyanto yang berjudul Ekonomi Politik Charles Kindleberger mengatakan bahwa kestabilan sistem keuangan dan perdagangan akan bisa terjadi apabila ada satu negara yang memimpin, yang mempunyai kekuatan yang dominan (hegemonik) (Hudiyanto, 2014).

Dalam upaya Tiongkok untuk menghegemoni perdagangan internasional Tiongkok banyak membuat kerjasama ekonomi dengan berbagai negara maupun kawasan. Seperti telah diketahui sejak diterapkan ACFTA (Asia Cina Free Trade Area) pada 1 Januari 2010 mengakibatkan meningkatnya volume impor dari wilayah ASEAN dan Tiongkok secara signifikan (Puspitasari & Prabawati, 2014, p. 460). Hal tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan Tiongkok untuk mempromosikan Renminbi sebagai mata uang yang sah dalam perdagangan internasional.

Tidak hanya itu, Tiongkok juga berani mengambil tindakan dengan mengeluarkan kebijakan terkait devaluasi mata uangnya. Hal ini dilakukan sebagai tujuan untuk mendongkrak perdagangannya di dunia internasional dan sebagai syarat untuk dapat menginternasionalisasikan Renminbi. Dengan begitu, langkah Tiongkok untuk dapat menghegemoni perdagangan dunia bisa lebih mudah. Dilihat dari segi internasional, Tiongkok ingin menghindari perang dagang dengan Amerika Serikat. Tiongkok juga ingin mendongkrak penggunaan Renminbi untuk tujuan politik, untuk menegaskan bahwa posisi mereka sangat kuat di pasar global. Kampanye terakhir yang dilakukan Tiongkok yakni mengusulkan agar Tiongkok menjadi mata uang

cadangan Badan Moneter Internasional (IMF). Ini menjadi salah satu contoh keinginan kuat Tiongkok agar mata uangnya menguat (Barratut Taqiyyah, 2015).

Keberhasilan Tiongkok dalam ekonomi tidak di ragukan lagi. Tak heran jika selama satu dekade terakhir Tiongkok menjadi salah satu negara besar dalam pertumbuhan perekonomian dengan perdagangan di dunia internasional. Bahkan Tiongkok telah menjadi pilihan utama bagi negara-negara lain untuk permasalahan perdagangan dan ekspor barang-barang dibandingkan dengan Amerika ataupun Eropa.

Melalui konsep Hegemoni ini, dianalisa bahwa Tiongkok merupakan negara yang bisa menjadi penguasa perdagangan internasional menyaingi Amerika Serikat dengan Dolarinya. Seperti yang diketahui bahwasannya pada era perang dingin, Uni Soviet dengan pengaruh hegemoninya mampu menyaingi Amerika Serikat dan ‘menguasai’ dunia. Saat ini Tiongkok ingin menjadikan negaranya sebagai negara yang mampu ‘menguasai’ dunia dalam hal ekonomi dengan menjadikan Renminbi sebagai mata uang internasional.

Ketika Renminbi yang secara resmi telah menjadi salah satu mata uang internasional, maka secara otomatis mata uang tersebut akan digunakan sebagai alat tukar yang sah untuk perdagangan internasional. Terutama bagi negara yang bekerjasama dengan Tiongkok. Seperti yang di ketahui, Tiongkok telah melakukan kerjasama dengan berbagai negara, bahkan sebelum ditetapkannya Renminbi sebagai mata uang internasional yang sah Renminbi sudah banyak di pergunakan di dunia sebagai alat tukar perdagangan. Kanada, Jerman, Hongkong, Brazil, Australia

melakukan transaksi perdagangan dengan Tiongkok menggunakan Renminbi dan bukan dolar Amerika. Adapun 40 bank sentral dunia yang menanamkan investasi mereka dengan Renminbi beberapa diantaranya, seperti Deutsche Bank, HSBC dan lain-lain (Arrahmannews, 2015). Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa Tiongkok bersama dengan Renminbi akan menghegemoni perekonomian internasional.

2. Teori Kepentingan Nasional

Teori kepentingan nasional menjelaskan bahwa untuk kelangsungan hidup suatu Negara maka negara harus memenuhi kebutuhan negaranya dengan kata lain yaitu mencapai kepentingan nasionalnya. Dengan tercapainya kepentingan nasional maka negara akan berjalan dengan stabil, baik dari segi politik, ekonomi, sosial, maupun pertahanan keamanan dengan kata lain jika kepentingan nasional terpenuhi maka negara akan tetap bertahan (Wijaya, 2013)

Daniel S. Papp yang mengatakan bahwa dalam kepentingan nasional terdapat beberapa aspek, seperti ekonomi, ideologi, kekuatan dan keamanan militer, moralitas dan legalitas. Dalam hal ini, yang mana faktor ekonomi pada setiap kebijakan yang diambil oleh suatu Negara selalu berusaha untuk meningkatkan kanperekonomian Negara yang dinilai sebagai suatu kepentingan nasional. Suatu kepentingan nasional dalam aspek ekonomi diantaranya adalah untuk meningkatkan keseimbangan kerjasama perdagangan suatu Negara dalam memperkuat sektor industri, dan sebagainya (Papp, 1988)

Kepentingan Nasional (National Interest) adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa/negara atau sehubungan dengan hal yang dicita-citakan. Dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap dan sama diantara semua negara/bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayah) serta kesejahteraan. Kedua hal pokok ini yaitu keamanan (Security) dari kesejahteraan (Prosperity). Kepentingan nasional diidentikkan dengan dengan “tujuan nasional”. Contohnya kepentingan pembangunan ekonomi, kepentingan pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) atau kepentingan mengundang investasi asing untuk mempercepat laju industrialisasi.

Hans J. Morgenthau, kepentingan nasional (national interest) merupakan pilar utama bagi teorinya tentang politik luar negeri dan politik internasional yang realis. Pendekatan morgenthau ini begitu terkenal sehingga telah menjadi suatu paradigma dominan dalam studi politik internasional sesudah Perang Dunia II. Pemikiran Morgenthau didasarkan pada premis bahwa strategi diplomasi harus didasarkan pada kepentingan nasional, bukan pada alasan-alasan moral, legal dan ideologi yang dianggapnya utopis dan bahkan berbahaya. Ia menyatakan kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini bisa diciptakan melalui teknik-teknik paksaan maupun kerjasama. Demikianlan Morgenthau membangun konsep abstrak yang artinya tidak mudah di definisikan, yaitu kekuasaan (power) dan kepentingan (interest), yang

dianggapnya sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan politik internasional. Para pengkritiknya, terutama ilmuwan dari aliran saintifik, menuntut definisi operasional yang jelas tentang konsep-konsep dasar itu. Tetapi Morgenthau tetap bertahan pada pendapatnya bahwa konsep-konsep abstrak seperti kekuasaan dan kepentingan itu tidak dapat dan tidak boleh dikuantifikasikan. Menurut Morgenthau "Kepentingan nasional adalah kemampuan minimum negara untuk melindungi, dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain. Dari tinjauan ini para pemimpin negara menurunkan kebijakan spesifik terhadap negara lain yang sifatnya kerjasama atau konflik" (Morgenthau, 1951)

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, dibalik keputusan Tiongkok menjadikan Renminbi sebagai mata uang internasional adalah adanya kepentingan nasional yang hendak di capai melalui internasionalisasi RMB. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu negara pasti memiliki tujuan atau kepentingan bagi negara itu sendiri, baik dalam sektor politik, ekonomi maupun sosial. Dalam hal ini kepentingan Tiongkok menjadikan RMB sebagai mata uang internasional adalah untuk memperoleh hegemoni atau kendali yang lebih besar dalam perdagangan internasional.

Hipotesa

Dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik hipotesa yaitu bahwa Tiongkok menjadikan Renminbi sebagai mata uang internasional, karena: dengan dijadikannya Renminbi sebagai mata uang internasional, maka

Tiongkok memiliki potensi untuk menghegemoni dalam bidang ekonomi melalui perdagangan di dunia internasional.

Metode Penelitian

1. Metode Pengumpulan Data

Penulis melengkapi data dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen yang telah dilakukan dengan cara menghimpun data sekunder (*library research*) dalam hal ini diwakili oleh informasi-informasi dan literatur-literatur yang relevan seperti buku-buku, data elektronik (internet), dan data lainnya yang berhubungan dengan rumusan masalah.

2. Metode Pengolahan Data

Penulis melakukan analisa data dengan menggunakan metode Induktif yaitu, mengelaborasi fakta-fakta yang terjadi dengan teori atau konsep yang mendukung fakta tersebut, Sedangkan dari segi pendekatan, penelitian ini bersifat induktif kualitatif.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui alasan Tiongkok menjadikan Renminbi sebagai mata uang internasional.

Batasan Penelitian

Untuk menghindari adanya pelebaran penjelasan mengenai Kepentingan Tiongkok maka dibutuhkan batasan penelitian. Adapun batasan penelitian ini adalah

alasan dijadikannya Renminbi sebagai mata uang internasional yang di tujukan pada kepentingan ekonomi-politik Tiongkok pada tahun 2005-2016.

Sitematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini agar dapat menghasilkan suatu karya tulis ilmiah yang terpadu, maka penulis akan membagi elaborasi dalam beberapa bab dimana setiap bab memiliki korelasi dan saling keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Berikut ialah perumusan bab dalam penelitian kualitatif ini:

BAB I merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, landasan teoritik, hipotesa, metode penulisan, tujuan penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II akan membahas mengenai sejarah dan pertumbuhan Tiongkok dalam bidang ekonomi.

BAB III menjelaskan *bargaining position* Tiongkok dalam perdagangan internasional.

BAB IV menjelaskan tentang potensi hegemoni Tiongkok dalam bidang ekonomi melalui perdagangan di dunia internasional.

BAB V merupakan kesimpulan atau penutup dari keseluruhan bab yang telah dibahas, berisi ringkasan singkat tentang penelitian yang disusun oleh penulis dari seluruh hal yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya.